

## **EVALUASI PROGRAM RELOKASI PERMUKIMAN PENDUDUK DI BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS OLEH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA (STUDI PADA BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI)**

**Ryan Hardi Wijaya<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*“Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda (Studi Pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai)”. Program Studi Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara, skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dibawah bimbingan Bapak Dr.H.Syahrani,M.Si dan Dr. Santi Rande. M.Si.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda (Studi Pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai) dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.*

*Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, Penanganan Program ini belum terealisasikan secara tuntas sesuai yang diharapkan. Terhitung sejak dicanangkannya kegiatan program kali bersih (PROKASIH) pada tahun 1989 dan sebagai tindak lanjut banjir besar yang terjadi di Kota Samarinda Pada tahun 1998 yang melumpuhkan aktifitas di Kota Samarinda Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus yang menghambat aliran sungai dan mengacu kepada berdasarkan acuan dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai dan himbauan dari Walikota Samarinda tentang pembongkaran permukiman kumuh di bantaran sungai Karang Mumus hingga saat ini belum terelisasi secara keseluruhan sesuai yang diharapkan. Terhitung masih banyaknya bangunan yang berdiri di Bantaran Sungai Karang Mumus. Dalam Penanganan program ini ditemukan beberapa kendala diantaranya Penyediaan dana penyelesaian dampak sosial (santunan bongkar), Penyediaan rumah beserta beberapa fasilitas penunjangnya untuk warga eks*

*relokasi masih kurang, terdapat beberapa bangunan yang belum dibongkar karena tempat pengganti atau lahannya belum ada walaupun ada biaya pembebasan lahannya pun sangat mahal, proses sertifikasi lahan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, . Email :

*diperumahan eks relokasi SKM yang belum selesai, dan aturan hukum yang baru yang mengatur tentang hibah.*

**Kata Kunci :** *Evaluasi Program, Relokasi, Permukiman Penduduk*

## **Pendahuluan**

Perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang memberikan gambaran mengenai suatu ruang kegiatan berkehidupan dan penghidupan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal. Selain sebagai tempat untuk bermukim, perumahan dan permukiman juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembentukan kualitas hidup manusia, karena didalamnya terdapat pembelajaran nilai-nilai kehidupan sehingga pembangunan perumahan dan permukiman berkaitan dengan peningkatan kelayakan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Perkembangan perumahan dan permukiman di Indonesia khususnya diperkotaan tidak terlepas dari adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan di kota. Pesatnya perkembangan penduduk tidak selalu diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada munculnya perumahan dan permukiman kumuh. Samarinda adalah salah satu kota yang secara geografis dikelilingi oleh Sungai Mahakam dan memiliki anak sungai yaitu Sungai Karang Mumus serta di bantaran atau dipinggiran Sungai Karang Mumus terdapat permukiman yang sangat kumuh. Salah Satu wilayah yang menjadi pusat pembangunan dan menjadi perhatian pemkot Samarinda Permukiman penduduk di wilayah bantaran Sungai Karang Mumus untuk direlokasi.

Dari beberapa penelitian didapat bahwa Sungai Karang Mumus telah menurun baik dari kualitas airnya maupun sempadan dan keadaan fisiknya. Sungai ini seharusnya menjadi pengendali banjir tetapi malah menjadi salah satu dampak banjir karena salah satu penyebabnya penumpukan sampah hasil dari limbah rumah tangga masyarakat yang tinggal dibantaran Sungai Karang Mumus. Banjir besar yang terjadi di Kota Samarinda pada tahun 1998 yang melumpuhkan aktifitas di Kota Samarinda, dengan banyaknya permukiman yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus tidak menutup kemungkinan dapat terjadi degradasi atau penurunan daya dukung lingkungan sungai yang akan merusak keseimbangan sistem lingkungan sungai, Oleh Karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi permukiman yang ada dibantaran Sungai Karang Mumus. Namun semenjak kegiatan tersebut dilaksanakan dari tahun 1998 hingga sekarang kebijakan tersebut belum terealisasi secara tuntas terhitung dari total jumlah permukiman yang ada dibantaran SKM sebanyak 3.915 yang saat ini terealisasi sebanyak 1.356 dan masih menyisakan sebanyak 2.559 rumah yang belum terealisasi dan untuk yang di Kelurahan Temindung Permai total rumah sebanyak 439 yang terealisasi baru 95 bangunan rumah sementara yang belum sebanyak 344 bangunan rumah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami masalah ini melalui penelitian yang berjudul Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda (Studi Pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai)

Selajutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda (Studi Pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai).**

### **Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik***

Kebijakan publik kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial didalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Nasucha, 2004:37)

### ***Evaluasi Kebijakan Publik***

Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar dari lingkungan politik

### ***Relokasi***

Pemindahan atau penempatan kembali masyarakat ke lokasi lain sesuai dengan rencana tata ruang, disini keuntungan yang didapat diperoleh masyarakat adalah perubahan hunian dari lokasi kumuh ke satu lokasi baru terbangun lengkap dengan sarana dan prasarana kota.

### ***Permukiman***

Pengertian dasar dari Permukiman dalam Undang-undang No 1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, fasilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau dikawasan pedesaan.

### ***Bantaran Sungai***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bantaran adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai antara sungai dan tanggul yang juga areal sempada kiri kanan sungai yang terkena atau terbanjiri luapan air sungai. Fungsi bantaran sungai adalah tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir.

### ***Definisi Konsepsional***

Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda (Studi Pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai) adalah Suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk merelokasi permukiman yang ada di bantaran sungai Karang Mumus salah satunya ialah di segemen yang berada dsi wilayah Kelurahan Temindung Permai untuk dipindahkan ke lokasi yang layak huni dengan tuuan untuk mengembalikan fungsi sungai salah satunya untuk mencegah banjir yang kerap terjadi dengan melihat tingkat pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Samarinda dari program tersebut melalui studi evaluasi.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif–kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

#### ***Fokus Penelitian***

Indikator-indikator dari Evaluasi :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan atau Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

#### ***Sumber Data***

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yaitu, dokumen-dokumen, dan buku-buku referensi atau ilmiah

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dan informan dalam penelitian ini adalah staff dari pelaksana teknis kegiatan program relokasi dan masyarakat maupun tokoh masyarakat seperti RT dan RW.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen dan penelitian lapangan (*Field Work Research*). Pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai **model interaktif** yang dikembangkan oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Manajemen (2014 hal: 405-412)” Miles dan Huberman . Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama, yaitu: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi Data; (3) Penyajian data; (4) dan Penarikan Kesimpulan. Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelumnya, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono 2014:405-412).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus***

Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk Di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda (Studi Pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai) data primer berdasarkan fokus penelitian dari Indikator-indikator Evaluasi berikut ini :

#### ***Efektifitas.***

Mengenai hasil efektifitas, efektifitas didukung dengan teori Dunne(2003) berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam upaya melakukan penanganan program relokasi belum mencapai hasil yang diinginkan. Sejak penancangan kegiatan Program Kali Bersih dan sebagai tindak lanjut dari bencana banjir besar yang terjadi di Kota Samarinda pada tahun 1998 atas dasar itulah Pemerintah mengeluarkan Kebijakan tentang penanganan program relokasi permukiman di Bantaran Sungai Karang Mumus. Namun Program tersebut belum terealisasi sampai sekarang terhitung dari total permukiman yang ada di Bantaran SKM sebanyak 3.915 yang sudah direlokasi sebanyak 1.356 dan masih menyisakan 2.559 bangunan yang belum direlokasi dan yang untuk di Wilayah segmen Kelurahan Temindung Permai dari total permukiman sebanyak 439 terealisasi baru sebanyak 95 dan masih menyisakan bangunan yang belum direlokasi sebanyak 344 bangunan rumah.

#### ***Efisiensi***

Efisiensi berkenaan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektifitas tertentu. Berkenaan dengan itu dari hasil penelitian didapat bahwa untuk mencapai tingkat efektifitas dari program kebijakan relokasi ini hal-hal yang diperlukan ialah lahan dan anggaran. Untuk lahan diperlukan lahan yang tentunya luas untuk menggantikan perumahan yang direlokasi. Untuk lahan saat ini pemerintah masih terkendala akan lokasi lahan yang dituju itu masih kurang dan untuk saat ini pemerintah masih mencarikan lahan yang kosong walaupun ada lahan yang tersedia tentunya lahan tersebut lokasinya sangat jauh dari Kota dan ini juga menimbulkan kontra dari masyarakat sebab masyarakat melihat lokasi yang strategis yang mudah terjangkau. Selain itu juga harga hak atas dasar tanah dari kepemilikan semula ke kepemilikan Pemerintah sangat mahal dan ini tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada dan tentunya dibutuhkan anggaran yang besar untuk merealisasikannya.

### ***Kecukupan.***

Kecukupan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang diinginkan, sejauh mana pencapaian hasil tersebut memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa untuk saat ini program yang sudah dijalankan pemerintah belum tuntas semua secara keseluruhan dalam memecahkan masalah seperti banjir, pencemaran lingkungan, permukiman kumuh yang masih berdiri di Bantaran SKM. Namun dari program yang sudah berjalan sedikit meminimalisir, memberikan solusi, dan memuaskan masyarakat salah satunya yaitu mengembalikan fungsi sungai sebagai pengendali air, meningkatkan kualitas hidup lingkungan masyarakatnya dan sedikit meminimalisir banjir didaerah sekitarnya dan juga dari upaya pemberian kompensasi secara gratis yang memiliki sertifikat rumah di Bantaran SKM. Namun dari masyarakat yang sudah direlokasi merasa belum cukup karena setelah mereka dipindahkan sarana akan listrik dan air belum terpenuhi baru beberapa bulan bahkan beberapa tahun berikutnya sarana tersebut terpenuhi. Dan untuk sarana fasilitas penunjang lainnya seperti pasar belum ada. Harapan masyarakat untuk segera dibangun fasilitas umum tersebut untuk pemenuhan kebutuhan penunjang perekonomian masyarakat.

### ***Pemerataan atau Kesamaan***

Kriteria pemerataan dan kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hasil penelitian yang didapat mengenai pemerataan atau kesamaan adalah dari segi tingkat pemerataan dan kesamaan dalam hal penyuluhan dan santunan atau pola penggantian bangunan pemerintah berupaya memberikan fasilitas secara merata ke warga yang terkena relokasi. Namun pada saat awal-awal pemindahan masyarakat tidak merasakan mendapatkan itu semua, mereka harus tinggal tanpa ada penerangan listrik dan air

bersih. Baru beberapa tahun mereka baru mendapatkan penerangan listrik karena baru ada sambungannya. Sementara untuk kebutuhan akan air bersih beberapa masyarakat ada yang ngebor tanah untuk mencari sumber air dan ada juga yang membeli ke tetangga yang punya sumur bor atau membeli tangki. Ada daerah yang sudah teraliri air namun air tersebut dirasakan tidak maksimal karena ngalirnya hanya sebentar saja dan harus bergantian itupun air yang mengalir tidak terlalu deras selain itu sarana infrastruktur jalan yang tidak memadai.

### ***Responsivitas***

Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakan adalah untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu. Tidak sampai disitu responsivitas sangat butuh ketepatannya, dalam penelitian ini berbicara mengenai bagaimana respon masyarakat terkait program relokasi. Kriteria Responsivitas menanyakan pertanyaan praktis : Apakah kriteria efektifitas,efisiensi,kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan,preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa masyarakat pada saat awal-awal pemerintah menjalankan program ini memang berat karena sempat mendapatkan pertentangan dari masyarakat yang menolak rumahnya untuk direlokasi dan juga sebagian masyarakat sudah terbiasa hidup di bantaran sungai karena apabila mereka dipindah ketempat yang baru mereka harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru selain itu juga masyarakat menilai lokasi tempat pengganti relokasi itu letaknya sangat jauh dari kota dan sulit untuk mendapatkan moda transportasi hal ini menyulitkan bagi mereka yang akan bekerja maupun bagi anak-anak mereka yang sekolah disisi lain masyarakat menilai mendukung dari program ini asalkan pemerintah serius menanganinya beri tempat pengganti yang layak sesuai dengan apa yang udah dijanjikan dan disosialisasikan. Disatu sisi juga mendapat respon positif dari masyarakat umum di Kota Samarinda yang tidak tinggal di bantaran SKM, mereka menilai turut mendukung relokasi permukiman kumuh di bantaran SKM sebab masyarakat menginginkan permasalahan banjir bisa teratasi dan menciptakan kawasan yang berwawasan lingkungan yang hijau di Kota Samarinda.

### ***Ketepatan***

Menurut Dunne, ketepatan berkenaan dengan apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat. Berdasarkan hasil penelitian diukur dari tingkat ketepatan sebagai indikator mengukur tingkat penilaian hasil yang sudah dijalankan bahwa kebijakan merelokasi perumahan dan permukiman merupakan cara yang tepat mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di Kota Samarinda misalnya seperti banjir. Sebab dengan merelokasi permukiman kumuh air sungai tersebut tidak terhambat saluran air menjadi lancar dengan menormalisasi SKM. Sebab permukiman kumuh ini sebagai tempat vital dari

permasalahan banjir yang terjadi, air sungai yang menjadi tercemar dan berbau dan sudah berubah warna karena perilaku menyimpang dari masyarakatnya yang suka buang kotoran ke sungai. Oleh karena itu dilakukan kebijakan penataan bangunan oleh pemerintah yaitu dengan merelokasi, hasil dari relokasi ini juga selain menormalisasi SKM juga dari segi masyarakatnya mempunyai nilai tambah dalam hal dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk***

#### ***Faktor Pendukung***

Yang menjadi faktor pendukung dari program relokasi ini adalah anggaran yang tersedia dan juga dukungan dari masyarakat, karena peran dari masyarakat ini juga sangat dibutuhkan dalam hal menjaga kelestarian sungai agar tidak membuang kotoran atau sampah ke sungai. Dan juga dukungan dari instansi terkait dan juga dari stakeholder yang lain untuk sama-sama bekerja sama atau berkoordinasi dengan baik untuk merumuskan dan merealisasikan program ini. Namun yang menjadi faktor paling dominan untuk merealisasikannya adalah dan atau anggaran yang tersedia.

#### ***Faktor Penghambat***

Yang menjadi faktor penghambat dari program relokasi ini adalah adanya tuntutan dari warga yang melebihi jatah santunan semestinya hal ini dipengaruhi lagi dengan sikap menolak warga yang tidak ingin bangunan rumahnya dibongkar apabila tuntutan tersebut belum terpenuhi hal ini juga berlaku sama di kasus lain warga menolak untuk melakukan pembongkaran apabila sarana dan prasarana serta fasilitas sosial dan umum di lokasi permukiman yang baru belum terpenuhi. Untuk tuntutan warga akan tersedianya fasilitas listrik dan air bersih juga menjadi hambatan akan terlaksananya program relokasi, penyediaan lahan yang masih kurang karena untuk melakukan pembebasan lahan harus melihat perkembangan kota dan harga jual tanahnya pun tinggi, serta faktor alokasi dana dan aturan payung hukum yang baru tentang hibah. Dari semua berbagai kendala dan hambatan itu yang menjadi faktor paling dominan adalah anggaran dan aturan hukum tentang hibah.

#### ***Kesimpulan***

1. Indikator Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk meliputi :

a. Efektifitas

Program ini belum tercapai atau terealisasikan sesuai yang diharapkan. Terhitung dari total jumlah bangunan yang terdapat di bantaran SKM sebanyak 3.915, yang sudah dibongkar baru 1.356 bangunan dan masih menyisakan bangunan yang belum dibongkar sebanyak 2.559. Untuk di wilayah segmen Kelurahan Temindung Permai total rumah sebanyak 439,



yang telah direlokasi sebanyak 95 bangunan rumah dan yang belum direlokasi sebanyak 344 bangunan.

b. Efisiensi

Hal-hal yang diperlukan untuk merealisasikan program ini adalah lahan persediaan sebagai tempat pengganti untuk permukiman baru dan untuk mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan anggaran atau dana yang besar untuk merealisasikan itu semua.

c. Kecukupan

Dengan cara merelokasi permukiman bantaran SKM hal ini sudah menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang kerap terjadi di Kota Samarinda meskipun belum secara tuntas dan untuk memberikan solusi dalam pemecahan masalah sebagai rumah yang dibongkar pemerintah memberikan secara gratis perumahan kepada warga namun hal itu dirasa belum cukup karena pada saat awal-awal pemindahan masih minim pasokan listrik dan air setelah beberapa bulan dan beberapa tahun kemudian baru mereka merasakan itu semua dan ada hal lainnya yang dirasa bagi warga masih belum cukup ialah tidak adanya fasilitas umum seperti pasar.

d. Pemerataan atau Kesamaan

Fasilitas yang diberikan tidak tersebar secara merata. Misalnya fasilitas akan air bersih masyarakat ada yang ngebor tanah untuk mencari air ada juga yang membeli air ke tetangga yang memiliki sumur bor dan membeli tangki. Ada juga daerah yang teraliri air bersih namun belum maksimal karena airnya ngalir sebentar saja dan bergantian dan airnya ngalir tidak deras. Dan juga sarana infrastruktur yang tidak memadai.

e. Responsivitas

Kebijakan merelokasi permukiman mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Pada saat awal pemindahan mendapat pertentangan dari masyarakat untuk direlokasi dan juga sebagian masyarakat sudah biasa hidup di bantaran sungai karena apabila mereka dipindahkan mereka akan adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru selain itu juga masyarakat menilai lokasi tempat pengganti yang dituju lokasinya sangat jauh dari kota dan sulit untuk mendapatkan akses moda transportasi hal ini menyulitkan bagi mereka yang akan bekerja dan bagi anak-anak mereka yang bersekolah disisi lain masyarakat menilai mendukung program ini asalkan pemerintah serius menanganinya, beri tempat yang layak sesuai dengan yang dijanjikan dan disosialisasikan. Disatu sisi juga mendapat respon yang positif dan dukungan dari masyarakat umum di Kota Samarinda yang tidak tinggal di bantaran SKM. Masyarakat tersebut

menilai agar persoalan dan permasalahan yang kerap terjadi seperti permasalahan banjir, pencemaran lingkungan bisa teratasi dan menjadikan kawasan hijau yang berwawasan lingkungan.

f. Ketepatan

Kebijakan merelokasi permukiman untuk mengatasi permasalahan seperti banjir dan pencemaran lingkungan dirasa sudah cukup tepat. Karena dengan dilakukannya relokasi bisa melancarkan air yang terhambat dan mengembalikan fungsi sungai sebagai pengendali air. Hasil dari relokasi ini juga selain untuk menormalisasi SKM juga dari segi masyarakatnya mempunyai nilai tambah dalam hal dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Evaluasi Program Relokasi Permukiman Penduduk :

a. Faktor Penghambat :

1. Penyediaan dana penyelesaian dampak sosial (santunan bongkar)
2. Penyediaan rumah beserta fasilitas penunjangnya untuk warga eks relokasi masih kurang
3. Terdapat bangunan yang belum dibongkar karena tempat penggantinya belum ada walaupun ada biaya pembebasan lahannya mahal
4. Proses sertifikasi lahan diperumahan eks relokasi SKM yang belum selesai
5. Payung hukum di atasnya dari Kemendagri tentang Hibah

b. Faktor Pendukung :

Yang menjadi faktor pendukung adalah anggaran yang tersedia dan juga dukungan dari masyarakat.

**Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah beserta jajarannya dan antar instansi terkait untuk lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan kerjasamanya dengan baik untuk dicari solusi hal-hal apa saja yang sekiranya kurang dari kebijakan program ini untuk dikaji, ditelaah dengan serius dari program kebijakan ini agar pelaksanaan yang akan berjalan selanjutnya tidak terjadi tumpang tindih antar instansi atau stakeholder supaya terjadi pemerataan dan kesamaan dari kebijakannya.
2. Untuk serius menyikapi hal ini karena merupakan permasalahan lama yang belum terealisasi agar tercipta kota yang bersih, teduh, rapi, aman dan nyaman serta berwawasan lingkungan dan hijau sesuai dengan visi dan misi Kota Samarinda.
3. Untuk lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan masyarakat sebagai bentuk dukungan seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Karena partisipasi masyarakat juga sebagai penentu dari keberhasilan suatu kebijakan

4. Untuk dicari solusi dan jalan keluarnya seperti kendala akan penyediaan dana dan aturan hukum agar bisa menjalankan program ini ketahap selanjutnya.
5. Kepada masyarakatnya agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta fungsi sungai dari pencemaran seperti tidak membuang kotoran atau sampah ke sungai, mengadakan program membentuk kelompok untuk mengadakan kegiatan bersih-bersih sungai untuk turut berpartisipasi.

### **Daftar Pustaka**

- AG. Subarsono.2009.*Analisis Kebijakan Publik*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Agustino, Leo.2008.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Alfabeta:Bandung
- Arikunto,S&Jabar.2004.*Evaluasi Program Pendidikan*.Jakarta:Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi dan Safrudin,Cepi.2009.*Evaluasi Program Pendidikan:Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*.Jakarta:Bumi aksara
- Budiono, Bambang; Musfihin, Dahlan; dan D,Sule, Abdullah.1997.*Pembangunan Perumahan Dalam Perspektif Pemerataan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Karya Panca Bhakti: Jakarta
- Dunn, W.N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Inc.
- Dunn,N.William.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Indiahono,Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J.2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Muhd, Muhtadi.1987. *Gejala Permukiman Kumuh*. Departemen Pekerjaan Umum: Jakarta
- Mutrofin.2005. *Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan,Program, dan Proyek)*. Laksabang Pressindo: Yogyakarta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, PMN: Surabaya

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-negara Berkembang*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

\_\_\_\_\_. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta: Bandung

Tayibnaps, F.Y.2000. *Evaluasi Program*. Rhineka Cipta: Jakarta

Wayne, Parsons. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps: Yogyakarta

Wirutomo, Paulus. 1996. *Tata Cara Pemugaran Permukiman Kumuh Di Perkotaan*. Departemen Kehakiman Indonesia: Jakarta

Zainul&Nasution.2001. *Penilaian Hasil Belajar*. Dirjen Dikti: Jakarta

### **Dokumen-dokumen :**

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan

Sungai, Daerah manfaat sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 1991 tentang Sungai

Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang No.1 tahun 2011 Tentang Pengertian Dasar Permukiman  
Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2013

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Kota Samarinda Tahun 2014

**Sumber Internet**

Samarindakota.go.id